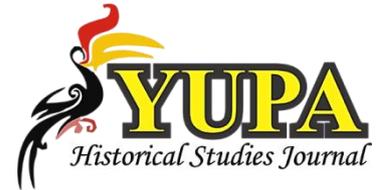


P-ISSN: 2541-6960; E-ISSN: 2549-8754

Yupa: Historical Studies Journal

Vol. 5 No. 2, 2021 (78-90)

<http://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/yupa>



Hegemoni Maritim dan Militer Kerajaan Sriwijaya di Kawasan Asia Tenggara Abad 7-10 M

Nanda Julian Utama¹

¹Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang, Indonesia

nanda.julian@mail.unnes.ac.id

Received	Accepted	Published
28/01/2022	08/03/2022	10/03/2022

Abstract This article discusses the Srivijaya kingdom during its golden period. The main issue raised was how the Srivijaya Kingdom was trying to build its maritime and military power between the 7-10 century AD. In its heyday, Srivijaya was able to control most of the western region of Southeast Asia. The extent of this kingdom's power requires it to have a strong base in maritime and military aspects. Although the center of Srivijaya in Palembang is not a coastal city, it can control the shipping network, especially around the Malacca Strait. There are at least three things that can be seen to describe the position of Srivijaya in its golden era, namely: the ability of the center to be able to control the vassal area, the ability to consolidate military power, especially the control of the sea people, and cultural ties that bind, for example in the magical aspect between kings. With all the people. This paper will use various relevant sources, including reviewing various writings and publications about Srivijaya from the previous period.

Key words: Sriwijaya Kingdom, Maritime, Militer, Sea Nomad

Abstrak Artikel ini membahas mengenai kerajaan Sriwijaya pada masa periode emasnya sekitar Abad ke 7-10 Masehi. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana upaya Kerajaan Sriwijaya dalam membangun kekuatan maritim dan militernya antara abad ke 7-10 Masehi. Pada masa jayanya di abad ke 7-10 Kerajaan Sriwijaya mampu menguasai sebagian besar wilayah barat Asia Tenggara. Luasnya kekuasaan kerajaan ini jelas mengharuskannya memiliki basis yang kuat dalam aspek maritim dan militer. walaupun pusat Sriwijaya adalah Palembang yang bukan merupakan kota pesisir, namun mampu menguasai jaringan pelayaran terutama di sekitar Selat Malaka. Setidaknya ada tiga hal yang bisa dilihat untuk menggambarkan posisi Sriwijaya pada masa emasnya tersebut, yaitu: kemampuan pusat yang mampu mengontrol daerah vasal, kemampuan dalam mengkonsolidasi kekuatan militer terutama penguasaan terhadap orang-orang laut, dan ikatan kultural yang mengikat misalnya dalam aspek magis antara raja dengan semua rakyatnya. Tulisan ini akan mencoba menggunakan berbagai sumber yang relevan termasuk menelaah kembali berbagai tulisan dan publikasi mengenai Sriwijaya dari masa sebelumnya.

Kata kunci : Kerajaan Sriwijaya, Maritim, Militer, Orang Laut.

PENDAHULUAN

Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di kawasan Nusantara. Bersama Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya dianggap sebagai representasi kekuatan Indonesia pada masa lalu. Sehingga legasi kekuatan kedua kerajaan sering dijadikan wacana politik, bahkan hingga sekarang. Keduanya merupakan dua kerajaan besar yang berbeda coraknya, Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan dengan orientasi agraris, sedangkan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim. Wacana kedua kerajaan dalam aspek politik adalah Majapahit untuk kekuatan didarat dan Sriwijaya untuk kekuatan di laut (Pradhani 2017).

Selama beberapa abad nama Sriwijaya hanya mitos. Nama Sriwijaya awalnya hanya sering muncul pada beberapa catatan para pedagang dan pengelana yang singgah ke wilayah perairan Asia Tenggara. Kemudian para sejarawan dan ahli lainnya menemukan fakta bahwa yang nama yang dikutip tersebut merupakan sebuah kerajaan yang besar. Hal ini didapatkan dari interpretasi pada beberapa tinggalan arkeologis yang berbicara mengenai kejayaan kerajaan ini. Pada masa jaya dan gemilangnya, kerajaan ini mampu menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara bagian barat, termasuk seluruh jalur pelayaran dan perdagangan yang penting di kawasan tersebut yaitu selat Malaka (Wolters 1970: 33-34).

Menariknya pada suatu masa kerajaan maritim ini justru berpusat tidak pada wilayah pesisir, melainkan berada didalam daratan yaitu Palembang. Secara geografis kota ini berada beberapa puluh kilometer dari wilayah pesisir timur Sumatera. Pada era perdagangan dan pelayaran pada masa Kerajaan Sriwijaya, untuk mencapai Palembang dibutuhkan waktu beberapa hari berlayar dari Selat Bangka masuk menuju jalur sungai. Beberapa catatan navigasi kuno mengatakan bahwa jalur sungai tersebut (Sungai Musi) memiliki peranan yang sangat penting sebagai jalur penghubung Palembang dengan dunia luar, termasuk juga penghubung antara Palembang dengan wilayah *hinterland* (pedalaman). Selama masa jayanya, kerajaan ini diklaim lewat berbagai temuan arkeologis dan catatan perjalanan pedagang asing mampu menguasai setidaknya Sebagian besar wilayah barat Asia Tenggara (Budisantoso 2006). Jelas untuk menguasai wilayah yang sedemikian besar tersebut, kerajaan ini harus memiliki kekuatan militer yang cukup. Tidak hanya kekuatan militer di darat, karena wilayah lautan yang dikuasai juga luas maka kerajaan ini juga harus memiliki kekuatan militer maritim yang kuat pula. Kekuatan militer dalam aspek maritim juga dibutuhkan untuk mengamankan jalur-jalur perdagangan, sehingga para pedagang cenderung aman jika akan melewati dan singgah di kota-kota kekuasaan kerajaan ini. Artikel ini akan mencoba mengungkap bagaimana gambaran kekuatan militer kerajaan ini, terutama kekuatan militer maritimnya. Sebuah hal menarik ditemukan bahwa kekuatan militer maritim kerajaan ini justru didapatkan dari relasi yang baik antara raja dan orang-orang laut diperairan Sumatra. Relasi ini patut diungkap untuk melihat mengapa Sriwijaya begitu digdaya di perairan Asia Tenggara antara abad 7-10 M.

METODE

Artikel ini menggunakan metode sejarah dalam proses penelitiannya (Kuntowijoyo, 1994; Padiatra, 2020). Dalam metode sejarah setidaknya ada empat tahapan penelitian yang harus dilakukan. Tahapan pertama adalah pengumpulan sumber, dimana sumber primer dalam tulisan ini merupakan narasi dalam prasasti-prasasti yang berbicara mengenai Sriwijaya pada kurun waktu tersebut. Selain itu tulisan ini akan mengandalkan berbagai catatan perjalanan asing yang memberikan gambaran mengenai Sriwijaya pada masa yang sama. Namun intepretasi dari sumber-sumber primer ini juga membutuhkan berbagai karya-karya penelitian arkeologis yang yang mampu memberikan tafsiran atas sumber-sumber primer tersebut. Tahapan kedua melakukan proses kritik sumber baik yang dilakukan secara eksternal (fisik) maupun internal (konten). Tahapan ketiga dalam proses penelitian ini adalah melakukan serangkaian tafsiran data dan penyusunan fakta-fakta yang didapatkan dari sumber. Tahapan terakhir dalam penelitian ini adalah melakukan penulisan karya sejarah yang dituangkan dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Palembang Dalam Hegemoni Kekuasaan Sriwijaya

Salah satu peneliti yang punya jasa besar mengangkat nama Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan maritim yang pernah eksis di Palembang adalah nama George Coedes. Tulisannya yang terkenal mengenai kerajaan ini berjudul *Le Royaune de Crivijaya*. Namun sebelum Coedes, Prof. Kern sudah lebih dulu meneliti mengenai kerajaan ini, hanya saja rujukan mengenai Sriwijaya yang dimaksud adalah nama seorang raja bukan sebuah kerajaan. Coedes kemudian lewat tulisannya tersebut membuka tabir mengenai nama Sriwijaya yang berabad-abad menjadi mitos. Lewat studinya ia memberikan kesimpulan bahwa Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan yang pernah eksis di Asia Tenggara dan berpusat di bagian tenggara Pulau Sumatera (Muljana 1960: 13-14).

Tidak banyak sumber yang bisa diakses pada masa awal penelitian mengenai Sriwijaya. Namun pasca penemuan beberapa prasasti di Palembang, lambat laun studi-studi mengenai Sriwijaya mulai mendapatkan perhatian dari para peneliti baik sejarawan maupun arkeolog. Setelah Coedes yang bisa dikatakan menjadi pioneer dalam penelitian dengan tema ini, muncul pula nama-nama lain yang meneliti Sriwijaya. Penelitian-penelitian ini selain menghasilkan berbagai informasi mengenai Sriwijaya juga menghasilkan perdebatan-perdebatan akademis terutama yang berkaitan dengan dimana pusat kerajaan ini berada.

Ada cukup banyak bukti tertulis yang berasal dari catatan perjalanan baik dari Cina maupun Arab yang memberikan keterangan mengenai Sriwijaya. Salah satu berita yang paling populer mengenai Kerajaan Sriwijaya datang dari catatan perjalanan I-Tsing, seorang biksu dari

Dinasti Tang yang singgah di Palembang untuk belajar bahasa Sansekerta sebelum belajar agama Budha ke wilayah India. Dalam catatan ini, I-Tsing secara gamblang menceritakan detail perjalanannya hingga sampai ke wilayah kekuasaan Sriwijaya dan menceritakan keadaan yang dia lihat ketika itu. Pada masa ini pula menurut I-Tsing, Sriwijaya (Palembang) adalah pusat agama Budha di Asia Tenggara dan merupakan tempat terbaik untuk belajar bahasa sansekerta sebelum melanjutkan studi ke wilayah India. Dari Palembang, I-Tsing sempat tinggal selama beberapa waktu sebelum pergi kembali melanjutkan perjalanannya menuju India untuk memperdalam agama Budha (Coedes 2015: 123-124).

Dari keterangan I-Tsing inilah, kita mengetahui bahwa Palembang memiliki kedudukan yang khusus pada abad ke 7 M. Wilayah ini menjadi pusat dari peradaban agama Budha dan juga bandar niaga besar pada masa tersebut. Rujukan ini kemudian dipakai oleh berbagai peneliti (termasuk pula oleh Coedes) yang sangat yakin bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya ini berada di Palembang, terutama pada periode emas antara abad ke 7-10 Masehi. Namun pendapat mengenai Palembang sebagai pusat dari Kerajaan Sriwijaya ini ditentang oleh peneliti lain yang bernama L. Moens. Dia menggunakan perspektif lain yang digunakan yang berbeda dengan peneliti sebelumnya yang lebih banyak menggunakan sumber dari catatan perjalanan dari Cina. Moens lebih banyak menggunakan catatan dari wilayah Timur-Tengah atau dari para pedagang Arab yang sempat singgah ke wilayah Sriwijaya. Dari berita-berita pedagang Arab yang di dapatnya, Moens beranggapan bahwa pusat kerajaan ini berada di sebelah timur Pulau Sumatera, dan pada periode berikutnya pindah ke dekat sungai Kampar yaitu wilayah Muara Takus (tempat ditemukannya candi peninggalan kerajaan ini) (Boechari 2012: 369-370; Muljana 1960: 18-19).

Selain wilayah sebelah timur (Riau) yang menjadi rujukan sebagai pusat kerajaan ini, ada pula peneliti lain yang berkesimpulan bahwa pusat kerajaan ini berada di wilayah Jambi. Pendapat ini datang dari Soekmono, dia beranggapan melalui studi geomorfologi peta yang dilakukannya, wilayah Jambi lebih cocok untuk menjadi pusat dari kerajaan ini, terutama karena letaknya yang cukup dekat dari Selat Malaka. Disamping itu secara arkeologis, di wilayah Jambi juga ditemukan beberapa peninggalan kerajaan Sriwijaya misalnya situs Muaro Jambi (Soekmono 1981: 45-47).

Pendapat yang lebih ekstrem juga ditulis oleh seorang sejarawan Jepang bernama Prof. Takashi Suzuki. Dalam karyanya berjudul *The History of Srivijaya, Angkor, And Champa* (2019), Suzuki mengklaim bahwa keterangan mengenai Sriwijaya dari George Coedes merupakan kekeliruan. Selama bertahun-tahun tidak ada yang menolak tesis Coedes mengenai Sriwijaya yang berpusat di Palembang, dimana menurut Suzuki itu merupakan kekeliruan. Dia mencoba menggunakan sumber kuno dari catatan perjalanan dari Cina dan mencoba mereinterpretasikan lagi keterangan I-Tsing. Suzuki berkesimpulan bahwa pusat Sriwijaya bukanlah di Palembang,

bahkan bukan di Sumatera, melainkan di wilayah utara Semenanjung Malaya pada sebuah wilayah yang menurutnya bernama Chaiya (Suzuki 2019: 23-29).

Namun jalan tengah dari perdebatan terkait pusat Sriwijaya sepertinya bisa menggunakan hasil penelitian OW. Wolters yang lebih moderat. Dalam permasalahan ini, Wolters memiliki kesimpulan yang sama dengan Coedes, bahwa Palembang memiliki peluang terbesar untuk menjadi pusat Sriwijaya dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang sebelumnya di jelaskan. Hal ini juga didasari oleh berbagai temuan arkeologis di Palembang dan juga berita-berita asing terutama dari Cina yang merujuk mengenai wilayah ini. Tetapi perkembangan politik dari Kerajaan ini juga menjadi perhatian dari Wolters. Bahwa memang benar letak kerajaan Sriwijaya berada di Palembang, namun juga tidak salah jika ada wilayah lain yang mengklaim diri sebagai pusat kerajaan ini (termasuk beberapa wilayah di Semenanjung Malaya). Permasalahan utamanya adalah pada periode kapan saja kota-kota tersebut menjadi pusat Sriwijaya, karena perubahan politik yang signifikan pada kerajaan ini juga berdampak pada pindahnya pusat kekuasaannya. Hal ini tentu saja untuk meneruskan eksistensi dari Sriwijaya walaupun kekuasaannya terus menyempit terutama pasca abad ke 10 (Wolters 1966: 225-239).

Relasi Kuasa Pusat dan Daerah dalam Kerajaan Sriwijaya

Sebagai sebuah kerajaan maritim yang besar kerajaan Sriwijaya memiliki beberapa aspek penunjang. Posisi kerajaan ini cukup strategis (termasuk Palembang) yang berada di jalur pelayaran Selat Malaka, dimana ketika itu merupakan jalur utama para pedagang dari dua emporium besar dunia yaitu Cina dan India. Sriwijaya memungkinkan menjadi tempat transit dagang yang baik bagi para pedagang dari wilayah Cina (timur) menuju India atau Arab (barat) begitupun sebaliknya. Begitu juga jika tujuan utamanya jika ingin berdagang di kota-kota pelabuhan lain disepanjang Sumatera dan Semenanjung Melayu. Namun pusatnya tetap berada di Palembang, mengingat sebagai pusat kerajaan, wilayah ini jelas mendapatkan suplai komoditas-komoditas yang berasal dari *hinterland*-nya yang kemudian dipasarkan di kota Palembang. Salah satu komoditas yang dijual adalah lada, walaupun lada sebenarnya lebih terkenal ketika periode kolonial, namun pada masa Sriwijaya lada juga diperdagangkan terutama dengan para pedagang India. Mereka membawa lada tersebut dari Sriwijaya, kemudian menjualnya kembali di pelabuhan-pelabuhan India dengan menggunakan nama lada India (Wolters 2011: 64).

Belum lagi dengan wilayah-wilayah lain yang menjadi taklukan Sriwijaya yang sebenarnya juga merupakan sebuah bandar dagang seperti wilayah Barus. Wilayah ini menghasilkan kapur barus (kamper) yang sangat terkenal dan dicari oleh para pedagang India dan Arab untuk dijadikan obat dan pengharum. Komoditas ini jika dijual dipelabuhan mereka

akan memiliki harga yang sangat mahal, oleh sebab itu mereka akan dengan sukarela dan bersusah-payah menuju wilayah tersebut hanya untuk mendapat komoditas berupa kapur barus tersebut. Dari sini juga bisa telusuri bahwa pemukiman Arab pertama di Indonesia adalah berada pada pesisir barat pulau Sumatera, dekat dengan wilayah penghasil kapur barus tersebut (Suswandari et al. 2021).

Diperkirakan hingga abad ke-7 dan 8 Masehi, Kerajaan Sriwijaya telah memiliki kekuasaan hampir sebagian besar wilayah barat Nusantara. Semua wilayah-wilayah tersebut dipersatukan dalam kevasalannya, termasuk di wilayah-wilayah di pesisir selat Malaka (Wolters 1970). Menurut berita dari Cina, setidaknya Sriwijaya menguasai 14 wilayah disekitar Sumatera, Semenanjung Melayu, dan pulau-pulau kecil disekitarnya untuk dijadikan vasalnya. Wilayah-wilayah yang dimaksud dalam 14 kevasalan tersebut yaitu: *Pe"eng-feng, Teng-ya-nung, Ling-ya-ssu chia, Chi-lan-tan, Fo-lo-an, Jih-lo-ting, ch-ien-mai-pa-ta, Tan-ma-ling, Chia-lo-hsi, Pan-lin-feng, Hsin-to, Chien-pei, Lan-wu-li*, dan *Hsi-lan*. Sedangkan dari sumber yang berbeda yaitu sebuah inkripsi dari India merujuk jumlah yang lebih sedikit dari berita Cina. Menurut berita dari India tersebut setidaknya Sriwijaya menguasai 13 wilayah kevasalan yaitu: *Srivijaya, Panpai, Malaiyur, Mayuridingam, Ilangasoka, Mappappalam, Mevilimbangan, Valaipanduru, Talaittakkolam, Madamalingam, Ilamuri-desam, Manakkavaram, dan Kadaram* (Colles 1974: 1-2).

Hal yang sama juga didapatkan berdasarkan penjelasan oleh I-Tsing ketika dirinya mengunjungi Sriwijaya. Dalam salah satu tulisannya, I-Tsing juga menggambarkan bahwa salah satu alasan mengapa Sriwijaya sangat berhasil mengontrol perdagangan pada masa itu adalah keberhasilan menguasai wilayah perairan di Selat Malaka, sebuah jalur perdagangan penting dan ramai dikunjungi oleh pedagang dari berbagai wilayah. Disamping itu hal ini juga ditunjang dengan keberhasilan Kerajaan Sriwijaya mengalahkan dan menguasai kerajaan disekitarnya dan dijadikan vasal-vasalnya baik itu yang berada di Pulau Sumatera, Semenanjung Melayu, dan wilayah-wilayah di Asia Tenggara (Coedes 2015: 127-128).

Kerajaan Sriwijaya hidup dan besar juga karena perdagangan yang terjadi disekitar wilayahnya. Selain Palembang, disekitar jalur pelayaran tersebut juga muncul kota-kota lain yang juga menjadi penunjang perdagangan. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga mendapat keuntungan lain dari ramainya perdagangan diwilayahnya, yaitu pajak dari kapal-kapal pedagang yang masuk wilayah perairannya. Dalam proses perdagangan di wilayah Kerajaan Sriwijaya, ada tiga pola kota dan pusat perdagangan yang ada dalam wilayah kerajaan, yaitu: *pertama*, pusat perdagangan yang berada di ibukota kerajaan yaitu Palembang. selain itu Palembang merupakan sebuah *enterport*, tempat berkumpulnya sebagian besar komoditas yang berasal dari pedalaman dan wilayah lain. Selanjutnya yang *Kedua*, adalah kota-kota pelabuhan lain yang menjadi sub regional *enterport* yang terdiri dari beberapa wilayah seperti: Kra, Kedah, Chaiya, Jambi, Lampung, Kota Cina, Kampar, Lamuri, dan Barus. Kota-kota tersebut walaupun

dikuasai oleh Sriwijaya namun dalam ranah lokal, para pemimpin lokal tetap diberikan kekuasaan. Kemudian yang *ketiga*, adalah keberadaan kota-kota kecil lainnya yang menjadi *feeder point* bagi perdagangan internasional disekitar jalur perdagangan di Selat Malaka (Kee-Long 1998: 295-308).

Oleh sebab itu untuk mengontrol wilayah laut yang luas dan cukup banyaknya wilayah kevasalan yang dikuasainya, Sriwijaya harus memiliki kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk bisa dimanfaatkan untuk melindungi hegemoninya. Salah satu yang paling utama dari kekuatan Sriwijaya berasal dari armada lautnya. Selama periode emas kerajaan Sriwijaya, wilayah laut perairan (terutama di Selat Malaka) menjadi aman dari gangguan para bajak laut dan perompak, jikapun ada hanya beberapa kasus saja. Selain memanfaatkan armada militernya yang ada, seperti yang pernah tercantum dalam Prasasti Kedukan Bukit, dimana Raja diiringi oleh armadanya baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan perahu. Bahkan dalam keterangan di Prasasti Kedukan Bukit tertera bahwa jumlah pasukan kerajaan Sriwijaya dalam sebuah ekspedisi ke pedalaman berjumlah 20.000 pasukan. Walaupun diduga, jumlah merupakan juga pasukan gabungan Sriwijaya dan pasukan lain. Sebuah gambaran yang cukup massif untuk jumlah pasukan pada masa tersebut (Hall 1976: 71-72).

Pasukan Sriwijaya juga digambarkan sebagai pasukan laut yang terlatih. Dalam kaitannya dengan sumber daya dan peralatan mereka memiliki, kekuatan yang lebih dari cukup misalnya jumlah kapal, senjata seperti rantai, serta strategi tempur yang mumpuni dalam melakukan peperangan di laut. Hal ini tentu saja berdampak pada semakin aman perairan kerajaan Sriwijaya dari ancaman para perompak, sehingga dapat memuluskan proses perdagangan yang terjadi di wilayah tersebut. selain itu dalam hal pengawasan, setiap kapal yang masuk wilayah Sriwijaya akan diperiksa terlebih dahulu dan diwajibkan untuk membayar pajak. Pasukan-pasukan laut akan cepat tanggap jika terjadi segala bentuk pelanggaran oleh kapal-kapal yang masuk. Menurut beberapa sumber Cina, kapal-kapal yang melanggar tersebut akan digiring masuk perairan sempit untuk diamankan bahkan jika perlu akan langsung dieksekusi (Kee-Long 1998: 301-302).

Hierarki Kekuatan Militer, Orang Laut, dan Kekuatan Magis Dalam Kerajaan Sriwijaya

Sebagai sebuah kerajaan besar yang memiliki wilayah yang luas, kekuatan militer jelas menjadi aspek penunjang eksistensi dari Kerajaan Sriwijaya. Dalam hierarki kekuatan militer kerajaan Sriwijaya, raja tetap mempercayakan posisi-posisi penting kepada keluarga dekat saja. Orang-orang yang merupakan keluarga dekat raja dianggap loyal dan dapat meminimalisir pengkhianatan dan pemberontakan (Hall 1976: 66-67).

Namun jangkauan raja dan orang-orang dekatnya memang tidak terlalu jauh, sehingga aktifitas politik di daerah vasal tetap menjadi wewenang pemimpin lokal disana. Pada dasarnya

pusat kerajaan Sriwijaya tidak terlalu memiliki dominasi kekuasaan, namun struktur pemerintahan dan pengaruh raja pada setiap pemimpin militer dan pemimpin lokal yang menjadi sekutu raja menjadikan terbentuknya semacam kekuatan militer yang kuat untuk raja. Para sekutu-sekutu ini lah yang kemudian memaksakan kekuasaan raja pada wilayah-wilayah yang tidak mau tunduk. Dalam beberapa prasasti disebutkan istilah mereka atau raja-raja kecil yang tidak mau mengakui kekuasaan kerajaan pusat akan diasingkan oleh raja (Hall 1976: 74).

Dalam prasasti-prasasti kerajaan sriwijaya juga menyebutkan beberapa istilah yang seperti jabatan-jabatan pemimpin militer. Misalnya ada istilah *Parvanda* yang merupakan pemimpin tertinggi pasukan dalam wilayah yang kecil. Kemudian dalam prasasti telaga batu juga disebutkan itulah *Nisamvarddhiku* yang mengarah pada yang sepertinya mengarah pada jabatan militer yang langsung melapor ke raja. Dalam prasasti yang sama juga teridentifikasi istilah senopati sebagai pemimpin militer kategori kedua, dibawah *Parvanda*. Satu lagi jabatan militer yang muncul dalam hierarki di kerajaan Sriwijaya adalah *Pratisara* yang diartikan sebagai komandan militer rendahan (Hall 1976: 75-76).

Disamping itu, Kekuatan militer Sriwijaya yang menarik yaitu kemampuan Kerajaan Sriwijaya untuk memanfaatkan orang-orang laut yang berada di pesisir timur Pulau Sumatera. Menurut I-Tsing, orang-orang laut tinggal disekitar muara sungai Musi (dekat Sungsang), yang dekat dengan perairan Selat Bangka (Hannigan 2015: 29-30). Menurut OW. Wolters, orang laut inilah yang memperpanjang kontrol kekuatan militer dari kerajaan Sriwijaya di lautan. Disisi lain, bagi orang-orang laut, raja digambarkan sebagai seorang sosok yang berkuasa dan harus ditakuti (Hall 2011: 73).

Relasi inilah yang patut untuk pertanyakan, mengapa orang-orang laut yang dikenal kejam mau tunduk pada raja yang bermukim di daerah pedalaman. Hubungan antara orang-orang laut dengan Raja Sriwijaya mirip dengan hubungan antara Raja Sriwijaya dengan para pemimpin militer dan kepala-kepala suku dipedalaman Sumatra. Raja dianggap memiliki kekuatan yang besar, dan mampu menarik para penguasa lokal misalnya dengan menamai sebuah wilayah yang berkenaan dengan vasal dan pemimpin tersebut, sehingga mereka didaerah juga merasa dihormati oleh Raja. Selain itu menurut keterangan dari para pengelana Arab yang sempat singgah di Palembang, mereka sempat menyaksikan upacara kematian raja, dimana simpanan emas raja dibagi bukan hanya untuk keluarga dekan raja, tapi juga untuk para penguasa militer Sebuah bentuk diplomasi untuk meredam konflik jika raja telah meninggal (Hall 1976: 73-74).

Orang-orang laut dikenal sebagai pasukan laut yang handal dan kuat. Keahlian mereka sebagai bajak laut di masa sebelumnya dimanfaatkan dalam aspek militer. Sebenarnya fenomena bajak laut bukan hanya di wilayah Sriwijaya, orang-orang laut yang memiliki profesi sebagai bajak laut sudah terkenal akan kekejamannya diberbagai perairan di Asia Tenggara. Namun

dalam kaitan ini Kerajaan Sriwijaya mampu menjalin hubungan yang baik dan memanfaatkan mereka sebagai bagian dari kekuatan militer lautnya. Kerajaan Sriwijaya juga memanfaatkan mereka untuk mengawasi wilayah perairan, terutama selat Malaka (Lapian 2009: 101-102).

Namun dengan gambaran kekuatan militer yang cukup besar, kerajaan Sriwijaya tetap memiliki masalah yang berkaitan dengan keamanan. Dalam kerajaan sendiri muncul para pemberontak yang juga berkolaborasi dengan bajak laut yang tidak tunduk pada raja. Pemberontak-pemberontak ini bisa siapa saja, mulai dari yang memiliki jabatan seperti pangeran, hingga mereka yang merupakan para pedagang kecil dan para budak. Kolaborasi mereka dengan para perompak dan bajak laut merupakan sebuah ancaman yang nyata bagi Sriwijaya. Hal ini biasanya terjadi pada wilayah vasal atau yang berada cukup jauh dari jangkauan pusat Kerajaan Sriwijaya di Palembang (Kulke 2014: 292-293).

Selain menggunakan kekuatan militer yang nyata, Kerajaan Sriwijaya juga menggunakan aspek-aspek lain dalam mengamankan daerah-daerah vasalnya diluar kekuatan militer. Raja menggunakan langsung kekuatan militernya jika masih dalam daerah yang ia bisa dia jangkau, biasanya yang tidak jauh dari Ibukota. Namun didaerah pedalaman kekuatan yang digunakan oleh raja menggunakan narasi-narasi berbau mistisme yang tertuang dalam beberapa prasasti (Hall 1976: 69).

Sebagian isi prasasti berisi tentang berita kebesaran raja dan penaklukan, sebuah narasi umum prasasti. Namun sebagian besar lainnya prasasti-prasasti tersebut berisi sumpah dan kutukan bagi para pembangkang dan pemberontak di Kerajaan Sriwijaya. Prasasti semacam ini biasanya menjelaskan mengenai kekuasaan raja yang tidak boleh ganggu (Kulke 2014: 283-285). Bahkan ancaman dalam setiap prasasti yang berisi kutukan pada pemberontak tidak main-main. Misalnya dalam prasasti Telaga Batu dijelaskan ancaman bagi orang-orang dalam wilayah raja yang berani menentang dan memberontak. Dalam baris ke 19 disebutkan bahwa pemberontak akan mati terbunuh berikut istri dan anak-anaknya, dan terbunuhnya karena kutukan dari raja. Bahkan kutukan ini juga berlaku untuk seluruh keluarga, kerabat, tema, dan orang-orang terdekat dari pemberontak tersebut, walaupun mereka tidak terlibat dalam pemberontakan tersebut (Hall 1976: 77-78).

Oleh sebab itu dalam kaitannya dengan prasasti kutukan tersebut, Sriwijaya memiliki hubungan yang kuat antar wilayah pusat (kedatuan) dengan wilayah-wilayah ditingkat bawahnya. Relasi ini baik bersifat politis, militer, dan kultural terkait dengan ikatan daerah vasal dan sumpah dari raja. Di Sriwijaya sendiri kedudukan seorang raja bukan hanya menjadi simbolisasi politik dan pemerintahan, tetapi juga berhubungan dengan kepentingan agama. Sehingga seorang raja juga dianggap suci oleh para bawahan dan rakyatnya, dalam kaitan ini apa yang dikatakan raja juga dianggap sebagai sesuatu yang bertuah, dan anggapan kutukan dari raja bisa saja menjadi kenyataan bagi rakyatnya (Hamid 2013: 54-55).

Disamping kekuatan militer terutama maritimnya, ada faktor eksternal mengapa Kerajaan Sriwijaya dapat melakukan kontrol dan pengawasan terhadap perairan di Asia Tenggara. Hal tersebut berhubungan relasi diplomasi antara Sriwijaya dan beberapa emporium besar dunia disekitar Asia Tenggara, seperti penguasa di Cina dan juga di India. Hubungan lebih awal antara wilayah Cina dan Sriwijaya telah terjalin bahkan sebelum abad ke 7, ketika beberapa inkripsi Cina mengatakan bahwa ada utusan-utusan dari sebuah kerajaan di wilayah selatan yang rajin datang dan memberikan barang-barang (upeti) berbagai hasil bumi dari wilayah tersebut seperti kamper, kayu gaharu, kunyit, gading, dan lain sebagainya (Wolters 2011: 190-191).

Sebelum abad 7 tersebut, bukan hanya Sriwijaya, namun wilayah-wilayah kecil lain juga tercatat secara kontinyu mengirimkan upeti hasil bumi mereka kepada penguasa di Cina, termasuk dalam kaitan ini adalah Barus yang mengirimkan kamper sebagai upeti. Namun pasca abad ke 7, agaknya hanya Sriwijaya yang masih terus mengadakan kontak dengan penguasa besar di Cina, dengan terus mengirimkan upeti. Sedangkan wilayah-wilayah lain masih belum. Beberapa ahli menyatakan bahwa tidak munculnya wilayah-wilayah kecil tersebut dalam catatan sebagai pemberi upeti karena telah masuk dalam satu paket upeti dari Sriwijaya yang pada abad ke 7 telah menjadi sebuah kerajaan besar. Penguasa di Cina juga sempat mengirimkan utusan diplomatiknya ke wilayah Sriwijaya pada abad ke 7. Kedatangan utusan ini menjadi sebuah simbolisasi bahwa hubungan antara Sriwijaya dengan penguasa Cina yang pada waktu itu dikuasai oleh Dinasti Tang sedang berjalan dengan baik. Menariknya, pasca menjadi sebuah kerajaan yang besar, Sriwijaya mulai menghentikan bentuk pengiriman upeti pada penguasa di Cina, setidaknya menjelang abad ke 10, masa dimana kegemilangan wilayah Sriwijaya mulai pudar (Wolters 2011: 284-285).

Sedangkan dengan penguasa lainnya di India, hubungan diplomatis juga terjalin harmonis. Pada abad ke 10, Kerajaan Chola di India yang tumbuh menjadi kerajaan kuat dan menjadi kerajaan yang ekspansionis. Bahkan Cina pun mengakui kerajaan ini sebagai kerajaan yang besar dan kuat. Kerajaan Sriwijaya melihat eksistensi Chola sebagai sebuah ancaman, namun Sriwijaya juga merasa tidak punya kekuatan besar untuk melawan Kerajaan Chola. Oleh sebab itu, menjalin hubungan diplomatis yang baik diperlukan oleh Sriwijaya untuk memenangkan hati penguasa Kerajaan Chola. Kesamaan dalam hal agama Budha digunakan untuk menjalin hubungan diplomatis yang baik kepada Kerajaan Chola, mengingat dua kerajaan ini adalah kerajaan dengan corak agama Budha. Pelajar-pelajar dari Kerajaan Sriwijaya seringkali dikirimkan untuk belajar di Nalanda yang merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Chola. Kerajaan Sriwijaya bahkan membuat sebuah candi di *Nagapatnam* untuk Kerajaan Chola, sebagai sebuah simbolisasi hubungan yang baik dalam agama Budha. Namun walaupun hubungan yang dibangun tetap baik dan masih dalam koridor religiusitas, tidak menghentikan

niatan dari Kerajaan Chola yang akan menyerang Sriwijaya pada abad ke 11. Kerajaan Chola sepertinya tidak melewatkan kesempatan untuk menyerang Sriwijaya pada masa mulai lemah kerajaan pada abad tersebut. Serta dalam kaitan mereka memanfaatkan hubungan yang buruk antara Sriwijaya dan kerajaan di Jawa. Rajendracola yang ketika itu menjadi raja Chola memimpin pasukan untuk menyerang Sriwijaya dan menjarah kekayaan kerajaan tersebut. Walaupun peperangan dengan Kerajaan Chola tidak bisa menghapuskan Kerajaan Sriwijaya, namun serangan dari kerajaan tersebut semakin melemahkan posisi Sriwijaya di kancah perdagangan global kala itu (Vlekke 2010: 47-48; Wolters 2011: 304-305).

Namun walaupun memiliki hubungan yang kurang baik dengan India, setidaknya Sriwijaya yang baru saja di serang masih memiliki hubungan yang baik dengan penguasa di Cina. Setelah vakum mengirimkan utusan ke Cina, Sriwijaya kembali mengirimkan utusan ke Cina sebagai tanda bahwa Sriwijaya mengakui kekuasaan penguasa Cina. Hal yang sama juga terjadi dengan India, walaupun sebelumnya sempat berperang, hubungan dengan kerajaan Chola mulai berangsur membaik. Namun walaupun keadaan diplomatis dengan penguasa-penguasa besar telah pulih, kekuatan internal terutama militer kerajaan Sriwijaya mulai melemah. Hal inilah yang nantinya akan jadi faktor utama ketika banyak vasal mulai melepaskan diri dan beberapa kerajaan di Jawa mulai menyerang kembali kedudukan Sriwijaya misalnya Singosari dan Majapahit. Selain itu prasasti-prasasti yang berisi kutukan kemungkinan tuahnya sudah tidak dipercaya pemimpin lokal di vasal-vasal tersebut (Vlekke 2010: 48)

KESIMPULAN

Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim yang terbesar di Nusantara dan Asia Tenggara. Kerajaan ini berpusat di Palembang pada masa jayanya sekitar abad ke 7-10 Masehi. Walaupun berada pada posisi yang agak menjorok ke daratan, wilayah Palembang tetapi dianggap strategis karena menjadi pusat perdagangan di wilayah Selat Malaka ketika itu. Disaat yang bersamaan, wilayah Kerajaan Sriwijaya bukan hanya terkenal sebagai kerajaan dengan posisi yang strategis, namun juga menjadi penghasil berbagai komoditas-komoditas penting yang diperlukan oleh para pedagang yang terutama berasal dari wilayah Cina, India, dan Arab.

Sebagai sebuah kerajaan yang besar dan juga memiliki kekuasaan yang luas, terutama pada perairan dan jalur-jalur perdagangannya, Sriwijaya memiliki berbagai faktor pendukung untuk mengontrol wilayah tersebut. Secara ringkas, setidaknya ada tiga cara yang dilakukan oleh Sriwijaya dalam rangka melakukan kontrol dan menjaga hegemoninya di wilayah perairan dan wilayah taklukannya yang lain, yaitu: Pertama, Sriwijaya memiliki kekuatan militer baik kekuatan di daratan dan kekuatan militer di lautan. Kekuatan di laut didominasi oleh kumpulan orang-orang laut yang setia dengan raja Sriwijaya. Kedua, adanya sebuah sistem politik dan militer yang memungkinkan terjadi pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Raja

memang menjadi kekuatan sentral di kerajaan, namun di vasal yang dikuasai raja tetap membiarkan pemimpin lokal memiliki hegemoni di daerahnya, tentu saja selama mengakui eksistensi raja. Disamping relasi magis antara pusat dan daerah vasal juga memiliki pengaruh, dimana cukup banyak prasasti yang ditemukan didaerah vasal Sriwijaya berisi mengenai kutukan-kutukan apabila membangkang pada kekuasaan raja. *Ketiga*, kemampuan Sriwijaya dalam menjalin hubungan diplomatis yang kuat dengan dua emporium besar yaitu Cina dan India. Hubungan dengan kedua wilayah tersebut memantapkan proses penyebaran pengaruh dan kekuatan Sriwijaya pada wilayah-wilayah yang mereka kuasai tanpa adanya gangguan dari dua kekuatan besar tersebut. Walaupun ada begitu banyak faktor lain mengapa Sriwijaya bisa menjadi sebuah kerajaan maritim yang besar, namun dari sudut penguasaan dan kontrol terhadap wilayah perairan, tiga hal penting ini bisa dikatakan menjadi indikator dan jawaban mengapa Sriwijaya bisa dengan leluasa mengontrol dan mengamankan wilayah lautnya dari berbagai ancaman, serta memperoleh keuntungan dari situasi yang demikian.

REFERENSI

- Boechari. 2012. *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti*. Jakarta: KPG.
- Budisantoso, H. 2006. "Sriwijaya Kerajaan Maritim Terbesar Pertama Di Nusantara." *Jurnal Ketahanan Nasional* 11(1):49-56.
- Coedes, George. 2015. *Asia Tenggara Masa Hindu Budha*. Jakarta: EFEO.
- Colles, Brian E. 1974. "The Extent Of Srivijayan Empire." in *International Conference on Asian History*. Yogyakarta.
- Hall, Kenneth R. 1976. "State and Statecraft in Early Srivijaya." in *Explorations in Early Southeast Asian History, the Origins of Southeast Asian Statecraft*, edited by K. R. Hall and J. K. Whitmore. Michigan: University of Michigan Press, University of Michigan Center for South East Asian Studies.
- Hall, Kenneth R. 2011. *A History of Early Southeast Asia*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.
- Hamid, Abd. Rahman. 2013. *Sejarah Maritim Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Hannigan, Tim. 2015. *A Brief History of Indonesia*. North Clarendon: Turtle Publishing.
- Kee-Long, So. 1998. "Dissolving Hegemony or Changing Trade Pattern? Images of Srivijaya in the Chinese Sources of the Twelfth and Thirteenth Centuries." *Journal of Southeast Asian Studies* 29(2):295-308.
- Kulke, Hermann. 2014. "Kadatuan Sriwijaya - Imperium Atau Kraton Sriwijaya ? Tinjauan Kmebali Bukti Epigrafis." in *Kadatuan Sriwijaya: Kajian Sumber Prasasti dan Arkeologi*. Depok: Komunitas Bambu.
- Lapian, AB. 2009. *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut, Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Depok: Komunitas Bambu.

- Muljana, Slamet. 1960. *Sriwidjaja*. Flores: Pertjetakan Arnoldus.
- Pradhani, S. .. 2017. "Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya Dan Majapahit Dalam Hukum Indonesia Kini." *Lembaran Sejarah* 12(2):186–203.
- Soekmono, R. 1981. "Once More The Location of Srivijaya." in *Studies On Srivijaya*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Suswandari, Suswandari, Nur Fajar Absor, Salsabila Tamimah, Yudha Faiz Nugroho, and Hanandita Rahman. 2021. "Menelisik Sejarah Perekonomian Kerajaan Sriwijaya Abad Vii-Xiii." *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya* 15(1):91–97. doi: 10.17977/um020v15i12021p91-97.
- Suzuki, Takashi. 2019. *The History of Srivijaya, Angkor, and Champa*. Tokyo: Mekong Publication Co., Ltd.
- Vlekke, Bernard. 2010. *Nusantara Sejarah Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Wolters, OW. 1966. "A Note On Capital Of Srivijaya During Eleventh Century." *Artibus Asiae* 23:225–39.
- Wolters, OW. 1970. *The Fall Of Srivijaya In Malay History*. London: Oxford University Press.
- Wolters, OW. 2011. *Kemaharajaan Maritim Sriwijaya Dan Perdagangan Dunia Abad III-VII*. Depok: Komunitas Bambu.